

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

DISUSUN OLEH :

PONCO SUSILAWATI

(B 200 120 103)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:

”PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA “ (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia).

Yang ditulis oleh :

PONCO SUSILAWATI

B 200 120 103

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2016

Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin, Ak., M.Si,)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

ABSTRACT

This research analyzes the influence of size , level of wealth , degree of dependence , capital expenditures , and audit findings by Financial oversight Agency, in Indonesian's name (BPK) toward the performance of local government as one of the public sector organizations.

The population is local governments who made Local Governance Processes Reports (LPPD) during 2013. The chosen sample is done using purposive sampling. This sample is used by 263 local governments around Indonesia. The used Data analysis method is descriptive statistics and hypothesis testing using multiple linear regressions.

The result shows that the size of the local government and variable of Capital expenditure does not have a significant effect on the performance of local governments. The level of wealth, intergovernmental revenue and audit findings has significant effect toward the performance of local governments. It shows that there is a negative relation between audit finding and financial performance of local government. Thus, the greater the findings of the audit will determine the financial performance of local governments

Key words: *size , level of wealth , intergovernmental revenue , capital expenditures , audit findings and the performance of local governments*

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik. Populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyusun LKPD tahun 2013.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini sebanyak 263 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan uji hipotesis yang menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*), dan belanja modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, atau dapat diartikan bahwa ukuran dan belanja modal Pemda kurang berpengaruh dalam penilaian kinerja Pemda. Sedangkan tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah (DAU), Temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda.

Kata kunci : *ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, temuan audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. Salah satu bentuk tanggungjawab tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah. Masyarakat merupakan pengguna utama dari laporan keuangan, karena secara tidak langsung masyarakatlah yang memberikan kekuasaan/mandat kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Dengan diungkapkannya laporan keuangan pemerintah kepada masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan dan memberikan respon atau koreksi apabila laporan yang disajikan tidak menunjukkan keefektifan kinerja maupun penerapan akuntabilitas dan transparansi pengurusan keuangan pemerintah daerah (Warsito, Abdul dan Handayani : 2008)

Beberapa alasan sehingga pengukuran kinerja sektor publik sangat penting sebagai strategi untuk memperkuat daya kompetensi sektor publik, yaitu : 1) sebagai fasilitas pembelajaran untuk perbaikan layanan, 2) sebagai pembelajaran memperbaiki praktik manajemen, 3) sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi. (Robinson, 2002:41) Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, dan program maupun kebijakan sesuai dengan sasaran tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Mustikarini dan Fitriani (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik pemda yaitu, ukuran daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit BPK berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan bahwa ukuran pemerintah, kekayaan daerah (PAD) yang besar memiliki skor kinerja yang tinggi. Sebaliknya dengan belanja modal dan temuan audit BPK yang semakin besar menunjukkan tingkat kinerja yang semakin tidak baik. Penelitian yang sama dilakukan oleh Sudarsono dan Rahardjo (2013) tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah daerah, penelitian yang termotivasi untuk mengkonfirmasi penelitian Mustikarini dan Fitriani (2012) ini menunjukkan hasil yang berbeda yaitu, hanya variabel tingkat kekayaan daerah sebagai salah satu karakteristik Pemda dan temuan audit BPK saja yang mendukung hasil temuan Mustikarini dan Fitriani (2012), tiga variabel independen lainnya tidak berpengaruh pada kinerja Pemda. Sedangkan Heriningsih dan Listyani (2013) menyatakan bahwa variabel karakteristik Pemda yaitu, tingkat ketergantungan dan total aset serta tingkat akuntabilitas Pemda yang meliputi, opini audit, tingkat penyimpangan SPI dan perundang-undangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa penelitian Heriningsih dan Listyani (2013) tidak mendukung hasil penelitian keduanya.

Dalam pengukuran kinerja diperlukan pula suatu pengujian keakuratan, obyektivitas, kelengkapan atas laporan, pernyataan atau rekening tertentu dengan tujuan untuk menilai apakah sasaran audit tersebut sesuai dengan standar atau perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada pula saatnya bahwa suatu pelanggaran itu terjadi pada suatu Pemda, semakin banyak pelanggaran atau temuan audit yang terjadi akan menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda.

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Setiawan (2012) mengenai teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemda akan menghasilkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah transparan dan akuntabel. Hal itu bertujuan agar mampu memberikan informasi yang berimbang antara pihak *agent* dengan *principal*. Dengan demikian informasi yang disampaikan akan mengurangi adanya *information asymmetry* maka kemungkinan tindak kejahatan korupsi akan berkurang.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 prg 3/ PP No. 17 tahun 2010 menjelaskan definisi Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan

Negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan Pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah (Fontanella dan Rossieta, 2014)

Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007) dalam Sumarjo, 2010.

3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang (Bastian, 2006).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 120 – 4761 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menimbang bahwa, Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perlu Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013.

Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan yang digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan dengan sumber utama LPPD yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (PP No. 6 tahun 2008). Tujuan utama dilaksakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD),

Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB) (Fontanella dan Rossieta, 2014)

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

a. Ukuran (*size*) Pemda

Size adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014), Medina (2012), dan Rora (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2009).

b. Tingkat Kekayaan daerah

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Tingkat kekayaan daerah ini diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Menurut Indrarti (2011) berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat (*Intergovernmental Revenue*)

Dengan desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Menurut Patrick (2007) *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. (Mustikarini dan Fitria, 2012)

d. Belanja Modal

Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaantugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Abdulah : 2006).

5. Temuan audit BPK

Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Dalam penelitian ini hasil pemeriksaan oleh BPK yang digunakan hanya Temuan Audit yang dapat dinilai dengan rupiah yang dapat menimbulkan kerugian dari adanya temuan audit. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan

suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

2. Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalam Sumarjo (2010) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik. Dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemda. Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

3. Pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah selain PAD adalah Dana Perimbangan. Green (2005) dalam tulisannya menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih kepada desentralisasi administrasi daripada desentralisasi fiskal, hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat masih membagi Pendapatan Negara untuk kebutuhan Pemda. Pemda rata-rata mendapatkan lebih dari 80% jumlah pendapatan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tarigan (2009) yang menyatakan bahwa pemda terlalu bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU dan DAK. Wisaksono (2008) menyatakan bahwa kemampuan daerah untuk menggali pendapatan yang berasal dari sumber internal masih rendah sehingga Pemda belum sepenuhnya mampu secara mandiri mendanai kegiatan pembangunan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

4. Pengaruh Belanja daerah terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap skor kinerja, hal ini berarti bahwa semakin besar belanja daerah maka semakin kecil skor kinerja. Hasil yang berbeda diperoleh Sudarsana (2013) dimana belanja modal tidak berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda, sedangkan penelitian Nugroho (2012) menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya, serta ingin mengetahui apakah belanja yang telah terealisasi telah sesuai dengan tujuan dalam program/kegiatan yang telah direncanakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 4: Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

5. Pengaruh temuan audit terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka seharusnya menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda.

Penelitian yang menghubungkan temuan audit langsung dengan kinerja Pemda masih sangat sedikit. Namun beberapa penelitian menyebutkan atau salah satunya yang dilakukan oleh Bernstein (2000) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Dengan demikian, hipotesis terakhir penelitian ini adalah:

Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

A. Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakandalam penelitian ini adalah LPPD pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013.

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampel yang diperoleh yaitu dari pemerintah daerah kabupaten/kotayang mempunyai Laporan APBD tahun anggaran 2013 untuk mendapatkan anggaran belanja daerah, laporan neraca untuk mendapatkan total aset, total utang, dan total modal, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk

mendapatkan PAD, DAU, BM, realisasi belanja dan total realisasi pendapatan yang diperoleh melalui laporan publikasi Departemen Keuangan, skor pemeringkatan daerah melalui hasil Evaluasi pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan temuan audit BPK dalam satuan rupiah melalui IHPS semester i-ii 2014.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan ketentuan :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam APBD dan memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2013.
- b. Terdapat laporan Neraca yang dimiliki oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2013.
- c. Terdapat hasil Temuan Audit BPK tahun anggaran 2013.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan pemerintah daerah atas berbagai aktifitas yang telah dilakukan. Penilaian kinerja Pemda kabupten/kota diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2014 Nomor 120 - 4761 berdasarkan LPPD tahun 2013 tingkat nasional dengan nilai pada tingkatan 0-4.

Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi dan Nasional, serta Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu :

No	Indeks EKPPD	Prestasi
1	3,00<.....≤4,00	Sangat Tinggi
2	2,00<.....≤3,00	Tinggi
3	1,00<.....≤2,00	Sedang
4	0,00≤.....≤1,00	Rendah

2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel independen (variabel bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau timbulnya variabel independen (terikat). Adapun dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Ukuran Pemerintah Daerah (X₁)

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012). Konsisten dengan penelitian Sudarsana (2013),

Mustikarini dan Fitria (2012), Sumarjo (2010) ukuran daerah (*size*) diprosikan dalam jumlah total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Total aset masing - masing Pemda memiliki selisih yang besar antar pemerintah daerah, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total aset diukur dengan rumus logaritma natural (Ln_TA).

b. Tingkat Kekayaan Daerah (X₂)

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah tinggi, maka akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran tingkat kekayaan daerah menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

c. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X₃)

Menurut Patrick (2007) Tingkat ketergantungan Pemda (*intergovernmental revenue*) adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Pada penelitian Mustikarini dan Fitria (2012), tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. (Halim, 2014:125) menyatakan bahwa DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah. Maka variabel tingkat ketergantungan diukur dengan membandingkan dana alokasi umum dan total pendapatan:

$$\text{Tingkat Ketergantungan dengan Pusat} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Pendapatan}}$$

d. Belanja Modal (X₄)

Kementrian keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurut Halim (2004) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset

tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Maka pada penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan rumus :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja}}$$

e. Temuan Audit BPK (X₅)

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Pada penelitian ini, temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitria (2012), serta Sudarsana (2013). Maka variabel temuan audit BPK dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan Audit (dalam Rupiah)}}{\text{Total Anggaran Belanja}}$$

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas). Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{KKPD} = \alpha + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{BM} + \beta_6 \text{TAB} + \epsilon$$

Keterangan :

KKPD : Skor Kinerja Keuangan Pemda

Koefisien Variabel Independen β_1, \dots, β_6 ,

Ln_TA : Ukuran Pemerintah Daerah

PAD : Tingkat Kekayaan Daerah

DAU : Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat

BM : Belanja Modal

TAB : Temuan Audit BPK

ϵ : Koefisien error

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Seleksi Sampel

Tabel 4.1
Jumlah Sampel Sesuai dengan Kriteria Penelitian

Karakteristik Sampel	Jumlah
Jumlah Pemda di Indonesia yang Menyusun LKPD tahun 2013 Pemerintah Daerah setingkat Provinsi	524 (33)
Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang Menyampaikan LKPD Jumlah Pemda Kabupaten/Kota yang tidak menyajikan data secara lengkap mengenai informasi yang dibutuhkan tahun 2013	491 (228)
Jumlah Sampel Akhir	263

2. Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Deskripsi Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKPD	263	.57720	3.37660	2.2899395	.67696583
LN_TA	263	13.19930	19.49350	14.5605373	.70885908
PAD	263	.00150	.51880	.0694293	.07072580
DAU	263	.01040	.90110	.6767684	.16255623
BM	263	.96630	7.43960	2.4861601	.97924443
TAB	263	.00000	.08760	.0059544	.01035245

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 (Lampiran 1)

Dari tabel 4.2 diketahui bahwa variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) yang diperoleh berdasarkan hasil pemeringkatan dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2013 oleh Kemendagri memiliki nilai minimum 0,57720 yaitu Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua yang berarti bahwa kinerjanya masih rendah, nilai maksimum 3,37660 diperoleh Kabupaten Lamongan yang berarti kinerjanya Sangat Tinggi, dan nilai rata-rata 2,2899395 ini berarti bahwa rata-rata kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota sudah termasuk Tinggi dengan deviasi standar 0,67696583.

B. Analisis Data Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada model pertama dengan menggunakan *one-sample* Kolmogrov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi perolehan data yang diuji untuk variabel pertimbangan

tingkat materialitas sebesar $0,074 > 0,05$ yang artinya bahwa residual model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* $< 0,10$ ini berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai > 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Dari hasil perhitungan model regresi menunjukkan hasil signifikansi variabel Ln_TA, PAD, DAU, BM, TAB terhadap Kinerja Keuangan PEMDA (KKPD) $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian sehingga model regresi layak untuk dipertimbangkan tingkat materialitasnya.

2. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut :

$$\text{KKPD} = 1,897 + 0,070 \text{ Ln_TA} + 2,252 \text{ PAD} - 0,831 \text{ DAU} - 0,053 \text{ BM} - 15,493 \text{ TAB} + e$$

Rumus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta sebesar 1,897, artinya jika ukuran pemerintah daerah (Ln_Total Aset), tingkat kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan (DAU), Belanja modal (BM), temuan audit BPK (TAB) nilainya 0 maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 1,897.
- 2) Nilai koefisien Ln_TA (β_1) menunjukkan nilai positif sebesar 0,070 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap Ln_TA sebesar satu (1) satuan maka akan berdampak pada peningkatan KKPD sebesar 0,070 dengan asumsi bahwa variabel konstan. Semakin tinggi Ln_TA akan meningkatkan KKPD 0,070.
- 3) Nilai koefisien PAD (β_2) sebesar 2,252 dengan nilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat kekayaan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan KKPD sebesar 2,252.
- 4) Nilai koefisien DAU (β_3) sebesar 0,831 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,831 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- 5) Nilai koefisien BM (β_4) sebesar 0,053 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan belanja daerah sebesar 1 kali maka

kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,053 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

- 6) Nilai koefisien Temuan (β_5) sebesar 15,493 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan temuan audit BPK sebesar 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah akan menurun sebesar 15,493 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$).

Dari kelima variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi, variabel ukuran Pemda dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk ukuran Pemda 0,304 dan Belanja Modal 0,164 yang keduanya jauh diatas 0,05. Sedangkan kekayaan daerah, ketergantungan dan temuan audit signifikan pada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dependen KKPD dipengaruhi oleh kekayaan daerah, ketergantungan dan temuan audit dengan persamaan sistematis yang telah dijelaskan dari rumus regresi sebelumnya.

c. Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai F-hitung sebesar 17,093 dengan nilai probabilitas 0,000. Karena nilai probabilitas F-hitung $< 0,05$ maka terbukti bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen yang meliputi ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, belanja modal dan temuan audit BPK terhadap variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai *adjusted R-square* sebesar 0,235. Hal ini berarti hanya 23,5% saja variasi model dapat dijelaskan oleh kelima variabel independennya. Sedangkan 76,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

C. Pembahasan

i. Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus logaritma natural (Ln) dari total aset. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama, ukuran pemerintah daerah **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan total aset tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran ukuran pemerintah daerah dalam

meningkatkan skor kinerja Pemda kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial.

ii. Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat kekayaan daerah diukur dengan kepemilikan PAD terhadap total pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah **berpengaruh signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar tingkat kekayaan daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada masyarakat. Hal ini berarti ada suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah PAD yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

iii. Hubungan Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan kepemilikan DAU terhadap total pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat **berpengaruh signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indrarti (2011) menyatakan salah satu fenomena *flaypaper effects* menyiratkan bahwa daerah yang lebih bergantung pada DAU daripada PAD merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber dayanya secara lebih efisien dan ekonomis, namun juga memiliki tingkat kemandirian yang lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari pusat. Peningkatan alokasi transfer juga cenderung diikuti oleh pertumbuhan belanja yang tinggi. Permasalahan yang ditakuti dalam hal ini adalah kemungkinan terjadi inefisiensi atau pemborosan terhadap DAU yang tidak diikuti terealisasinya target PAD. Kinerja Pemda yang baik adalah bagaimana menggunakan DAU secara efisien untuk dapat menggali PAD yang lebih besar.

iv. Hubungan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Belanja modal diukur dengan kepemilikan belanja modal terhadap total realisasi belanja. Hasil uji regresi untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa belanja modal **tidak berpengaruh signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa semakin besar belanja modal, akan menyebabkan semakin kecil nilai kinerja pemerintah daerah tersebut. Sudarsana (2013) menyatakan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dikarenakan terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap belanja

modal dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi tersebut memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah. Belanja modal seharusnya mampu menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

v. Hubungan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Temuan audit BPK diukur dengan jumlah temuan audit yang tidak sesuai dengan perundang-undangan terhadap total anggaran belanja. Temuan audit BPK yang tidak sesuai dengan perundang-undangan diakibatkan dengan adanya kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil uji regresi untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa temuan audit BPK **berpengaruh signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Mustikarini dan Fitria (2012) menyatakan bahwa semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut semakin rendah. Temuan audit merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD dengan hasil kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut. Oleh sebab itu Pemda harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah secara akuntansi saja, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengujian dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (Ln_Total Aset) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.7 nilai t-hitung lebih kecil t-tabel ($1,030 < 1,968$) dengan signifikansi 0,304 ($p > 0,05$) maka **H_1 ditolak**.
2. Koefisien regresi tingkat kekayaan daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel 4.7 diperoleh koefisien regresi untuk variabel kekayaan daerah bernilai positif yang berarti bahwa variabel tersebut mempunyai arah yang positif. Sedangkan nilai t-hitung sebesar 3,613 lebih besar t-tabel yaitu 1,968 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga **H_2 diterima**.
3. Variabel tingkat ketergantungan daerah (DAU) memiliki nilai t-hitung - 2,903 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,968 dan signifikansi -0,831 ($p < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Pemda berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

sesuai dengan tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai negatif, ini berarti semakin kecil DAU maka akan semakin baik kinerja keuangan Pemda. Hasil ini sejalan dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sehingga **H₃ diterima**.

4. Hasil pengujian menunjukkan variabel Belanja modal (BM) memiliki nilai t-hitung -1,395 lebih kecil dari t-tabel 1,968 dan signifikansi 0,164 ($p > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Koefisien regresi Hasil dalam tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai negatif, ini berarti semakin kecil belanja modal maka akan semakin rendah kinerja keuangan Pemda. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sehingga **H₄ ditolak**.
5. Hasil pengujian menunjukkan variabel temuan audit BPK (TAB) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil t-hitung sebesar -4,286 lebih kecil dari t-tabel 1,968 dan signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Koefisien regresi bernilai negatif, sehingga menunjukkan adanya hubungan negatif antara temuan audit dengan kinerja keuangan pemda. Dengan demikian maka semakin besar temuan audit maka akan menurunkan kinerja keuangan pemda. Hal ini sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sehingga **H₅ diterima**.
6. Berdasarkan hasil uji R² variabel ukuran Pemda (Ln_TA), kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah (DAU), belanja Modal (BM), dan Temuan audit (TAB) proporsinya cenderung kurang dominan dalam mempengaruhi kisaran Kinerja Keuangan Pemda yaitu hanya 23,5%. Artinya masih banyak atau kisaran 76,5% variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemda.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Tahun pengambilan sampel yang hanya menggunakan satu tahun yaitu tahun 2013. Penulis berusaha untuk meneliti Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk jangka waktu yang lebih panjang namun karena format atau isi laporan tahunan yang berbeda sehingga beberapa data tidak tersedia untuk menambah jangka waktu data penelitian.
2. Proksi pengukuran variabel yang digunakan sama persis dengan penelitian sebelumnya sehingga mungkin apabila digunakan pengukuran lain yang bisa mengungkapkan pengaruhnya akan memperoleh hasil yang berbeda.
3. Variabel independen yang digunakan hanya dapat menjelaskan sedikit dari pengaruhnya terhadap dependen.

C. Saran

1. Menambah jangka waktu data untuk sampel yang digunakan dalam penelitian agar lebih representatif.
2. Menggunakan proksi lain untuk variabel dependen seperti kemandirian atau efektifitas sehingga dapat lebih menginterpretasikan kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi penelitian berikutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga menjadi karakteristik Pemda yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester i Tahun 2014*. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ii Tahun 2014*. <http://www.bpk.go.id>
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Carnegie and West. 2005. *Making Accounting Accountable in Public Sector Critical Perspective On Accounting*. Vol. 16, pp.905-928.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Heriningsih, Suchyo dan Ruserlistyani. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal ekonomi dan Bisnis, Volume 13. Nomor 02, September 2013
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1
- Julitawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Vol. 1, No. 1; 15-29)
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 – 4761 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Laverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Inonesia*. *Accounting Analysis Journal* 1
- Liu, Chih Hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. *School of Public Policy*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.